

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI  
PEKERJAAN UMUM  
NOMOR : 01/ PRT/M/2014  
TANGGAL : 24 Februari 2014

JENIS PELAYANAN DASAR, INDIKATOR  
KINERJA, DAN BATAS WAKTU PENCAPAIAN  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

**Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**  
**Sub Bidang Sumber Daya Air**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun 2019	Cara Mengukur	Upaya Pencapaian
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>SPM Provinsi</b>							
1	Penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat	Meningkatnya keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat	persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya	%	70	- survey	Pembangunan/ peningkatan; rehabilitasi; serta O&P jaringan irigasi
<b>SPM Kabupaten/Kota</b>							
1	Penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat	Meningkatnya keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat	1. persentase Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari	%	100	- survey	Pembangunan/ peningkatan; rehabilitasi; serta O&P prasarana air baku
			2. persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya	%	70	- survey	Pembangunan/ peningkatan; rehabilitasi; serta O&P jaringan irigasi

**Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Sub Bidang Jalan**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun 2019	Cara Mengukur	Upaya Pencapaian
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>SPM Provinsi</b>							
1	Penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat	Meningkatnya kualitas layanan jalan Provinsi	persentase tingkat kondisi jalan provinsi baik dan sedang.	%	60	Pengukuran kondisi jalan untuk memperoleh nilai IRI dapat dilakukan menggunakan: 1. Alat ( <i>Naasra/ Romdas/ Roughometer</i> ) 2. Metode visual dengan cara menaksir nilai <i>Road Condition Index</i> (RCI) yang kemudian dikonversikan ke nilai <i>International Roughness Index</i> (IRI) yang dilakukan pada kondisi tertentu )*	Setiap Pemerintah Provinsi memiliki alat pengukur ( <i>Naasra/ Romdas/ Roughometer</i> ) untuk menentukan nilai IRI Membina dan menyediakan sumber daya manusia yang dapat: 1. Melakukan survei kondisi jalan menggunakan alat <i>Naasra/ Romdas/ Roughometer</i> (untuk pengukuran menggunakan alat). 2. Menginterpretasikan kondisi jalan ke nilai RCI yang selanjutnya dikonversi ke nilai IRI (untuk pengukuran menggunakan metode visual).  Melakukan pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala untuk mencapai dan mempertahankan kondisi jalan baik dan sedang berdasarkan nilai IRI
2	Penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat	Tersedianya konektivitas wilayah Provinsi	persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi (konektivitas) di wilayah provinsi	%	100	Pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi sesuai yang tercantum pada RTRW Provinsi telah terhubung oleh jaringan jalan.	Setiap Pemerintah Provinsi melakukan pembangunan/ penambahan ruas jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi yang masih belum terhubung dengan jaringan jalan.  Percepatan penyelesaian Perda tentang RTRW Provinsi

SPM Kabupaten/ Kota							
1	Penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat	Meningkatnya kualitas layanan jalan Kab/Kota	persentase tingkat kondisi jalan kabupaten/kota baik dan sedang.	%	60	Pengukuran kondisi jalan untuk memperoleh nilai IRI dapat dilakukan menggunakan: - alat (Naasra/ Romdas/ Roughometer) - visual dengan cara menaksir nilai <i>Road Condition Index</i> (RCI) yang kemudian dikonversikan ke nilai <i>International Roughness Index</i> (IRI) yang dilakukan pada kondisi tertentu )*	Setiap Pemerintah Kabupaten/ Kota memiliki alat pengukur (Naasra/ Romdas/ Roughometer) untuk menentukan nilai IRI  Membina dan menyediakan sumber daya manusia yang dapat: 1. Melakukan survei kondisi jalan menggunakan alat Naasra/ Romdas/ Roughometer (untuk pengukuran menggunakan alat). 2. Menginterpretasikan kondisi jalan ke nilai RCI yang selanjutnya dikonversi ke nilai IRI (untuk pengukuran menggunakan metode visual).  Melakukan pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala untuk mencapai dan mempertahankan kondisi jalan baik dan sedang berdasarkan nilai IRI
2	Penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat	Tersedianya konektivitas wilayah Kab/ Kota	persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten/ kota	%	100	Pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi sesuai yang tercantum pada RTRW Kabupaten/ Kota telah terhubung oleh jaringan jalan.  Percepatan penyelesaian Perda tentang RTRW Kabupaten/ Kota	Setiap Pemerintah Kabupaten/ Kota melakukan pembangunan/ penambahan ruas jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi yang masih belum terhubung dengan jaringan jalan.

Ket )\* :

1. Apabila menggunakan alat pengukur ketidakrataan permukaan jalan (Naasra/ Romdas/ Roughometer) hasilnya sudah tidak *feasible* (nilai count/ BI > 400)
2. Apabila situasi lapangan tidak memungkinkan menggunakan kendaraan survei, maka disarankan menggunakan metode visual (RCI)
3. Apabila tidak mempunyai kendaraan dan alat survei, maka disarankan menggunakan metode visual (RCI)

**Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**  
**Sub Bidang Cipta Karya**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun 2019	Cara Mengukur	Upaya Pencapaian
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>SPM Kabupaten/Kota</b>							
1	Penyediaan air minum	Meningkatnya kualitas layanan air minum permukiman perkotaan	persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	% Penduduk	81,77%	Contoh - survey; - kuesioner; dll.	
2	Penyediaan sanitasi	Meningkatnya kualitas sanitasi (air limbah, persampahan dan drainase) permukiman perkotaan	persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	% Penduduk	60%	Contoh - survey; - kuesioner; dll.	
			persentase pengurangan sampah di perkotaan	% Penduduk	20%	Contoh - survey; - kuesioner; dll.	
			persentase pengangkutan sampah	% Penduduk	70%	Contoh - survey; - kuesioner; dll.	
			persentase pengoperasian TPA	% pengoperasian TPA	70%	Contoh - survey; - kuesioner; dll.	
			persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun	% penduduk	50%	Contoh - survey; - kuesioner; dll.	
				% pengurangan genangan	50%	Contoh - survey; - kuesioner; dll.	
3	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Meningkatnya tertib pembangunan bangunan gedung	persentase jumlah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan	IMB	60%	pendataan	
4	Penangan Pemukiman Kumuh Perkotaan	Berkurangnya permukiman kumuh di perkotaan	persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	Ha	10%	Contoh - survey; - kuesioner; dll.	

**Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Sub Bidang Jasa Konstruksi**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun 2019	Cara Mengukur	Upaya Pencapaian
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>SPM Provinsi</b>							
1	Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi	Meningkatnya ketersediaan informasi jasa konstruksi	persentase tersedianya 3 (tiga) layanan informasi jasa konstruksi Tingkat Provinsi pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI)	%	100	Input data layanan informasi jasa konstruksi langsung masuk ke server SIPJAKI pusat untuk langsung direkapitulasi	a. Penanggungjawab SIPJAKI tingkat provinsi mengkoordinasikan dan mengumpulkan data-data terkait 3 jenis layanan informasi jasa konstruksi dari instansi-instansi terkait b. Administrator SIPJAKI Tingkat Provinsi melakukan input data dan memutakhirkannya secara berkala. c. Administrator SIPJAKI Tingkat Provinsi diberikan pelatihan agar dapat menggunakan aplikasi SIPJAKI
<b>SPM Kabupaten/Kota</b>							
1	Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi	Meningkatnya ketersediaan informasi jasa konstruksi	persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi Tingkat Kabupaten/Kota pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI)	%	60	Input data layanan informasi jasa konstruksi langsung masuk ke server SIPJAKI pusat, sehingga perkembangan nilai pencapaian layanan informasi dapat langsung diketahui Pemerintah Pusat dan Provinsi, serta direkapitulasi	a. Penanggungjawab SIPJAKI tingkat Kabupaten/Kota mengkoordinasikan dan mengumpulkan data-data terkait 7 jenis layanan informasi jasa konstruksi dari instansi-instansi terkait b. Administrator SIPJAKI Tingkat Kabupaten/Kota melakukan input data dan memutakhirkannya secara berkala. c. Administrator SIPJAKI Tingkat Kabupaten/Kota diberikan pelatihan agar dapat menggunakan aplikasi SIPJAKI

2	Izin Usaha Jasa konstruksi	Meningkatnya kualitas layanan perizinan usaha jasa konstruksi	persentase tersedianya layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dengan Waktu Penerbitan Paling Lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah Persyaratan Lengkap	%	100	<p>1. Instansi penerbit IUJK melakukan pencatatan kinerja pelayanan dengan menggunakan Lembar Kendali SPM IUJK</p> <p>2. Pengisian Lembar Kendali SPM IUJK dilakukan pada setiap pemohon IUJK</p> <p>3. Instansi penerbit IUJK melakukan rekapitulasi catur wulan kinerja pelayanan IUJK atau 4 (empat) bulan sekali dihitung mulai bulan Januari</p> <p>4. Rekapitulasi kinerja pelayanan IUJK dilaporkan kepada Pemerintah Provinsi dan pemerintah Pusat dengan melampirkan salinan Lembar Kendali SPM IUJK.</p>	<p>a. Pemerintah Pusat berkerjasama dengan Pemerintah Provinsi, melakukan sosialisasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota</p> <p>b. Pemerintah Provinsi melakukan monitoring pelaksanaan SPM IUJK kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayahnya.</p> <p>c. Pemerintah Provinsi mengkoordinasikan dan mendorong pelaporan rekapitulasi catur wulan kinerja pelayanan IUJK untuk setiap kabupaten/kota di wilayahnya</p> <p>d. penanggung jawan Pelaksanaan SPM IUJK di tingkat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan dan mendorong terlaksananya SPM IUJK oleh instansi pelaksana IUJK</p>
---	----------------------------	---	--	---	-----	--	---

**Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**  
**Sub Bidang Penataan Ruang**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun 2019	Cara Mengukur	Upaya Pencapaian
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>SPM Provinsi</b>							
1	Informasi Penataan Ruang	Meningkatnya ketersediaan informasi penataan ruang	persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Provinsi berserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	%	100	survey	percepatan penyelesaian perda tentang RTR wilayah Provinsi; penyediaan peta; publikasi di media massa mengenai peta yang telah tersedia
<b>SPM Kabupaten/Kota</b>							
1	Informasi Penataan Ruang	Meningkatnya ketersediaan informasi penataan ruang	persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Kabupaten/Kota berserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	%	100	survey	percepatan penyelesaian perda tentang RTR wilayah kabupaten/kota; penyediaan peta; publikasi di media massa mengenai peta yang telah tersedia
5	Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik	Meningkatnya ketersediaan RTH	persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	%	50	survey	penertiban area yang direncanakan menjadi RTH; penganggaran penyediaan dan pengelolaan RTH publik

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM  
Kepala Biro Hukum,  
  
Siti Martini  
NIP. 196803311984122001

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

ttd.

DJOKO KIRMANTO